

**ANALISIS PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK,
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMDA LAINNYA, PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN IPM DI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

Suparlan¹, Dewi Ris pawati²
Universias Mataram
Suparlan23@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak, DBH dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2014–2023. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik dan uji signifikansi parsial serta simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap IPM pada tingkat signifikansi 10%, dengan nilai R^2 sebesar 79,4%. Secara parsial, DBH Pajak/Non Pajak dan Pajak Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, sedangkan DBH dari Provinsi/Pemda Lainnya dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah untuk mendukung peningkatan IPM. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pembangunan manusia berbasis keuangan daerah.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Kemajuan Pembangunan suatu negara memiliki ukuran ketercapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan, yang sering dijadikan dimensi penilaian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator yang digunakan yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Pendekatan yang dilakukan mengintervensi peningkatan kesehatan penduduk dapat dilihat dari besaran anggaran yang dialokasikan untuk belanja sarana fasilitas kesehatan. Dimensi Pendidikan diintervensi melalui ketersediaan prasarana fasilitas Pendidikan maka dapat dilihat dari besar anggaran yang dialokasikan. Dimensi standar hidup layak diintervensi melalui kesiapan infrastruktur akses investasi baik, transportasi dan layanan lainnya membuka lapangan pekerjaan penduduk bekerja menghasilkan pendapatan digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Peningkatan IPM Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dimana IPM capaiannya lebih dari 70 poin tergolong tinggi. Kondisi IPM nasional lebih stabil walaupun menghadapi gangguan bencana Covid 19. Kondisi IPM di daerah mengalami kondisi yang berbeda disetiap provinsi dan kabupaten/kota yang secara umum menunjukkan stabilitas menghadapi bencana Covid 19.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengejar ketertinggalan dalam Pembangunan di berbagai sektor, indikator angka penduduk miskin yang masih tinggi berada dibawah rata-rata

nasional. Nilai IPM Provinsi NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu berada dalam kategori "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Faktor yang berpengaruh terhadap IPM Provinsi NTB yaitu Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan infrastruktur. Dimensi-dimensi ini perlu dikejar memenuhi ketertinggalannya. Upaya mencari tahu faktor apa saja yang menyebabkan pencapaian IPM yang tinggi di NTB. Secara fiskal nampak pada APBN atau APBD keberpihakan politik anggaran untuk Pembangunan nasional atau daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Gulo, et al. (2023) menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap IPM.

Pembiayaan Pembangunan daerah berasal dari Dana bagi Hasil Pajak/non Pajak yang merupaka dana transfer pemerintah pusat. Daerah sebagian besar bergantung pada dana transfer sehingga kemandirian pembiayaan daerah masih rendah. Penggunaan anggaran secara tepat sasaran menjadi keharusan dalam mengejar ketertinggalan Pembangunan. Pembagian dana bagi hasil pajak/non pajak memiliki formula yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan peraturan kementerian keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ina, et. al. (2024) menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap IPM. Pembelanjaan anggaran harus sesuai prioritas agar lebih cepat berdampak pada kemajuan daerah. Sofyan dan Widia (2021) menyatakan DAU, DAK, berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat digunakan untuk pembiayaan Pembangunan ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan sehingga ketertinggalan bisa dicapai. Karampuan, et. al. (2023) menyatakan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan Penduduk bisa dipenuhi karena masyarakat juga mendapatkan pendapatan. Rizkiyah dan Anitasari, (2023) menyatakan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Sumber pembiayaan bagi daerah berasal juga dari provinsi lain, pajak hasil pertambangan berdampak terhadap dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Dana Bagi hasil (DBH) pajak provinsi lain bagian dari pendapatan pajak yang diterima oleh suatu provinsi dari pajak yang dipungut oleh provinsi lain. Sebagai negara kesatuan republik Indonesia antar daerah memiliki hak atas penghasilan daerah yang lainnya. Penerimaan dari DBH Pajak provinsi lain menjadi tambahan pendapatan daerah lain untuk melaksanakan Pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) menyebutkan DBH Pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penggunaan dana yang tepat dalam Pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi memberikan dampak pada peningkatan IPM. Sofyan dan Widia (2021) menyatakan DBH berpengaruh IPM, namun bisa terjadi ketika penggunaan tidak efisien dan efektif IPM bisa rendah misalnya terjadinya korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Suhyanto, et. al. (2020), Sembiring et. al. (2023) dan Ina dan Hudang (2024) menyatakan DBH dan DAK berpengaruh IPM ketika penggunaan anggaran yang diterima secara tepat.

Pembangunan daerah yang diatur oleh regulasi berasal dari pajak daerah yang masih menjadi sumber pendapatan daerah dilakukan upaya pertumbuhan agar menjadi mandiri. Besarnya pendanaan untuk meningkatkan IPM daerah sebagai wujud kualitas kehidupan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan, oleh karena itu sumber pendanaan yang berkelanjutan harus dimiliki. Sari & Rochmatullah (2024) menyebutkan Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh pada peningkatan IPM daerah, daerah melakukan upaya meningkatkan sumber-sumber yang lain yang berkelanjutan. Upaya mencari sumber yang sesuai dengan peraturan perundangan dalam menuju daerah yang mandiri, tidak tergantung dengan pemerintah pusat dalam upaya Pembangunan daerah. Pembiayaan tidak bisa ditumpukan pada transfer pemerintah pusat saja, selain bersumber dari pajak daerah, pemerintah daerah mencari sumber dari retribusi daerah sebagai sumber yang memiliki potensi besar dan berkelanjutan.

Daerah melakukan identifikasi sumber retribusi daerah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Afandi et. al., (2024) menyebutkan pajak dan

retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan yang menunjukkan masyarakat memiliki kualitas hidup yang meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Panigoro et. al., (2023) menyebutkan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai program yang dapat mendatangkan sumber pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah pusat juga memberikan alokasi anggaran sebagai suport dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Harliyani dan Haryadi (2020) menyebutkan Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keselarasan belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sentuhan dana dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat Pembangunan yang di daerah.

Kemandirian Pembangunan oleh daerah menjadi perhatian semua pihak karena mengandalkan transfer pemerintah pusat dipastikan tidak bisa membiayai berbagai program kesejahteraan daerah. Ukuran ketercapaian Pembangunan daerah ada pada Tingkat pertumbuhan IPM, pertumbuhan jumlah Penduduk harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang baik. Pembangunan bertumpu pada manusia kualitas hidup masyarakat menjadi perhatian utaa pada ukuran IPM. Upaya daerah menggalali potensi sumber pendapatan menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rochmatullah (2024) menyebutkan Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM, peningkatan sumber pendapatan dari dua sumber pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian yang dilakukan Rahmadillah & Nurfaisa (2024) menyatakan Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, ini menemukan bahwa tarif retribusi yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan Penduduk. Ditemukan penggunaan pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak mendorong peningkatan belanja moda oleh Imam Taufiq, Darmanto, & Wikan Budi Utami (2023). Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pembentuk utama Pendapatan Asli Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Indek Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia sebagai salah satu rujukan dalam memberikan ukuran capaian Pembangunan suatu daerah dan negara. IPM telah dikembangkan oleh berbagai intitusi dari Lembaga internasional dan nasional, dari pemerintah dan nongovernment organitation. United national Devlopment Programme (UNDP) pada tahun 1990 telah mengembangkan IPM. Pada awalnya Pembangunan diukur dari sisi ekonomi yaitu pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, namun sudah bergeser ke faktor-faktro Kesehatan, Pendidikan dan kualitas hidup. IPM telah dikerucutkan menjadi tiga dimensi utama yaitu Kesehatan yang diukur dengan harapan hidup saat lahir (life expectancy at birth), Pendidikan diukur oleh rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan standar hidup yang layak yang diukur menggunakan pendapatan nasional bruto per kapita.

Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah

Pembiayaan Pembangunan daerah bersumber dari dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Bagi hasil daerah dan pusat menerangkan pendaptan yang diperoleh dari sumber daya alam dan pajak dibagikan antara pemerintah pusat dan daerah. Melihat sumbur pendapatan negara dan daerah yaitu berasal dari sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan swasta dan BUMN dan dapat berasal dari pajak. Layanan yang diberikan kepada badan atau warga negara oleh negara atau daerah dapat dikenakan retrebusi yang masukkan ke kas negara atau daerah. Tujuan Bagi hasil anatara pemerintah pusat dan daerah ditujukan untuk memberikan tambahan dana dalam membangun daerah.bererapa teori yang berkembang

menjelaskan tentang dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah yaitu teori fiscal federalism dan teori desentralisasi fiskal. Sari & Rochmatullah (2024) menyebutkan Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Rahmadillah & Nurfaiza (2024) menyatakan Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hobrouw et. al., (2021) menyebutkan PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap IPM.

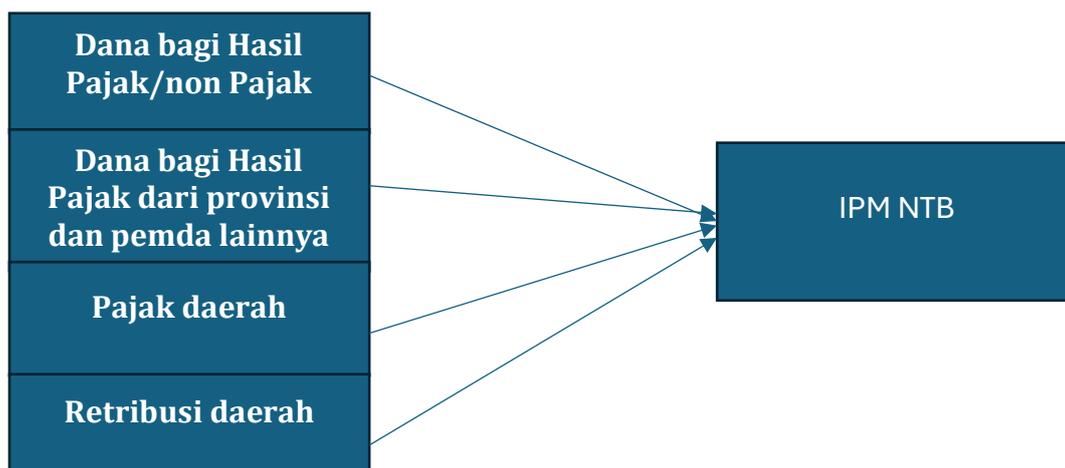
Pembiayaan Pembangunan Negara dan Daerah dapat berasal dari pajak dan retribusi, dari kekayaan alam, dari laba yang diperoleh perusahaan milik negara BUMN dan BUMD. Sebagian besar negara mengandalkan pungutan yang bersumber dari pajak untuk membiayai jalannya pemerintahan dan Pembangunan. Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara kepada negara dengan tanpa mendapatkan balas jasa langsung yang dapat dipaksakan diatur dengan undang-undang untuk pembiayaan Pembangunan. Dana bagi hasil daerah yang berasal dari pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak lainnya. Dana bagi hasil yang berasal dari dana gabi hasil sumber daya alam (non pajak).

Dana bagi hasil Pajak Provinsi lain

Kabupaten dalam satu wilayah provinsi mendapatkan kucuran bagi hasil dari kabupaten yang memiliki hasil daerahnya begitu juga provinsi yang memiliki hasil daerahnya akan memberikan bagi hasil ke provinsi yang lain. Afandi, et. al., (2024) menemukan Pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mencari potensi pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Riandhani, et. al., (2023) menemukan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Devita dan Wijaya (2021) menyebutkan Pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Beberapa contoh dana bagi hasil pajak provinsi berasal dari pajak-pajak yang menjadi kewenangan provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak Bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak Rokok dan pajak Air Permukaan. Sari dan Rochmatullah (2024) menyebutkan Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap IPM, ini menunjukkan bahwa pembiayaan Pembangunan bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber pembentuk APBN yang paling utama bersumber dari pajak dan Bea Cukai. Undang-undang yang mengatur tentang pajak diatur dalam UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah masih mengandalkan pajak dan retribusi dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembagian pajak daerah ada dua jenis yaitu pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pajak dan retribusi daerah diatur dalam peraturan daerah sedangkan pajak pusat diatur dalam undang-undang. Rahmayani dan Kurnadi (2022) menyatakan pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah terus diupayakan untuk menuju kemandirian keuangan dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi instrumen penting dalam desentralisasi fiskal. Sembiring et. al. (2023) menyatakan dana perimbangan dan PAD berpengaruh terhadap IPM dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi.



MEDODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data numerik atau angka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentasi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang diperoleh berupa IPM, Dana bagi hasil Pajak/non pajak, Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemda lainnya, Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemda lainnya, Pajak daerah dan Retrebusi Daerah. Penelitian menggunakan data amatan sebanyak 10 tahun mulai tahun 2014 sampai dengan 2023.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistic SPSS. Pertama kali dilakukan uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, hetroskedastisitas dan autokorelasi dari data yang diperoleh. Hasil penelitian uji asumsi klasik menunjukkan data bebas dari asumsi klasik maka dapat disimpulkan data tidak bias. Model regresi linier berganda menggunakan uji t dan uji f dengan nilai alfa lebih kecil dari 0,05 dan Uji R *Square* yang digunakan dalam penelitian ini menjawab hipotesis penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji F digunakan untuk mengetahui *Goodness of Fit* apakah model yang digunakan layak. Berikut disajikan table Hasil Uji F.

Tabel. 1
Anova Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	160.481	4	40,120	4,820	0,057 ^b
	Residual	41.621	5	8,324		
	Total	202.102	9			

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 4,820 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,057. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Artinya, variabel independen X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nilai Sum of Squares sebesar 160,481 untuk

regresi menunjukkan besarnya variasi Y yang dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, sedangkan nilai residual sebesar 41,621 menunjukkan sisa variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Secara keseluruhan, meskipun model belum signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, namun telah memenuhi kriteria signifikan pada tingkat kepercayaan 90%, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai model yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil Uji R Square digunakan juga dalam menguji kemampuan variabel independent mempengaruhi variabel dependen, nilai adjusted R Square mendekati angka 1 menunjukkan model yang digunakan semakin baik.

Tabel 2
Hasil Uji R Square

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,891 ^a	0,794	0,629	2,88517	2,080

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil output Model Summary, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,794. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 79,4% variasi pada variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen X1, X2, X3, dan X4 secara simultan. Sementara itu, sisanya sebesar 20,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,629 menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, dan menunjukkan bahwa setelah dikoreksi, sekitar 62,9% variasi Y masih dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen tersebut. Nilai Adjusted R Square umumnya digunakan untuk menilai keandalan model ketika terdapat lebih dari satu variabel bebas. Selain itu, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 2,88517 menggambarkan besarnya kesalahan standar dari model dalam memprediksi nilai Y. Semakin kecil nilai ini, maka semakin baik model dalam memprediksi. Terakhir, nilai Durbin-Watson sebesar 2,080 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data, karena nilai tersebut mendekati angka 2, yang merupakan nilai tengah dalam uji Durbin-Watson. Dengan demikian, asumsi independensi residual dalam regresi linear terpenuhi.

Tabel 3
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	48,146	7,536		6,389	0,001
	X1	-4,749	0,000	-2,479	-2,903	0,034
	X2	8,135	0,000	3,360	3,280	0,022
	X3	-1,585	0,000	-0,968	-3,947	0,011
	X4	1,878	0,000	1,015	2,595	0,049

Sumber: Data Diolah 2025

Berdasarkan output tabel Coefficients, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 48,146 - 4,749X_1 + 8,135X_2 - 1,585X_3 + 1,878X_4$$

Adapun interpretasi dari masing-masing koefisien adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta (Intercept) sebesar 48,146 berarti jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai IPM diperkirakan sebesar 48,146.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak memiliki koefisien sebesar -4,749 dengan nilai signifikansi 0,034. Ini menunjukkan bahwa X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, setiap peningkatan 1 satuan pada X1 akan menurunkan Y sebesar 4,749, dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya memiliki koefisien positif sebesar 8,1350 dengan nilai signifikansi 0,022, yang berarti X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Semakin besar nilai X2, maka nilai Y juga cenderung meningkat.
- d. Pajak Daerah menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap Y, dengan koefisien -1,585 dan nilai signifikansi 0,011, yang merupakan nilai paling signifikan di antara variabel lainnya.
- e. Retribusi Daerah memiliki koefisien positif sebesar 1,878 dan nilai signifikansi 0,049, yang juga menunjukkan bahwa X4 berpengaruh signifikan secara positif terhadap Y pada tingkat signifikansi 5%.

Selain itu, nilai t-hitung pada masing-masing variabel yang melebihi nilai kritis (dengan signifikansi $< 0,05$) menegaskan bahwa seluruh variabel independen dalam model ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak (X1), DBH dari Provinsi dan Pemda Lainnya (X2), Pajak Daerah (X3), dan Retribusi Daerah (X4) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara simultan, model regresi ini signifikan pada tingkat 10% ($\alpha = 0,10$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 79,4%, yang berarti sebagian besar variasi IPM dapat dijelaskan oleh keempat variabel ini.

DBH Pajak/Non Pajak (X1) menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Karampuan et al. (2023) yang menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat terjadi apabila penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran atau tidak langsung berkontribusi pada pembangunan manusia, seperti belanja pegawai atau proyek yang tidak bersifat inklusif. Sebaliknya, Ina dan Hudang (2024) justru menunjukkan pengaruh positif, yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci.

DBH dari Provinsi dan Pemda Lainnya (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Ini mendukung temuan Sularso dan Restianto (2011) bahwa DBH Pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap IPM. Penggunaan dana ini umumnya dialokasikan untuk sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan, dua dimensi utama IPM.

Pajak Daerah (X3) memberikan dampak negatif signifikan terhadap IPM, berbanding terbalik dengan penelitian Sari dan Rochmatullah (2024) yang menemukan pengaruh positif signifikan. Perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh struktur pajak yang tidak efisien, tingginya tarif yang menekan daya beli masyarakat, atau rendahnya kontribusi pajak terhadap belanja publik yang produktif. Temuan ini juga konsisten dengan Taufiq et al. (2023) yang menyatakan bahwa penggunaan PAD, termasuk pajak, belum optimal dalam mendukung belanja modal yang berdampak langsung pada IPM.

Retribusi Daerah (X4) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM, sejalan dengan temuan Afandi et al. (2024) yang menyatakan bahwa retribusi berkontribusi pada kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, Rahmadillah dan Nurfaiza (2024) memperingatkan bahwa jika tarif retribusi terlalu tinggi, dampaknya justru bisa negatif terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, keseimbangan dalam kebijakan tarif retribusi menjadi penting agar dapat mendukung peningkatan layanan publik tanpa membebani masyarakat. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien serta transparan dalam rangka meningkatkan IPM di daerah yang masih tergolong sedang seperti NTB. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya

literatur terkait hubungan keuangan daerah dengan pembangunan manusia, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan daerah berbasis fiskal.

SIMPULAN

Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi NTB. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan DBH belum sepenuhnya disalurkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap pembangunan manusia. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemda Lainnya berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Dana ini efektif mendorong pertumbuhan IPM melalui peningkatan kualitas layanan dasar. Pajak Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap belanja publik produktif belum maksimal atau berpotensi menekan konsumsi masyarakat. Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, yang berarti bahwa retribusi telah berperan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan manusia. Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,629, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel ini cukup kuat dalam menjelaskan variasi IPM di NTB selama periode 2014–2023.

Keterbatasan

REFRENSI

- Afandi, A., Defung, F., & Amalia, S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11743–11751.
- Al Rasyid, H., & Indah K, A. T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015–2022. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3691–3701.
- Gulo, H., Fitrawaty, & Arwansyah. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 59–73. Yogyakarta. Jurnal UST Jogja.
- Harliyani, E. M., & Haryadi. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3).
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2).
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. Waingapu. ejournal.nusantaraglobal.ac.id.
- Karampuan, A., Suharto, R. B., & Lestari, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 45–60. Samarinda. Jurnal ITB Semarang.
- Panigoro, A. N., Kumenaung, A. G., & Walewangko, E. N. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kota Manado Tahun 2007–2021). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4). E-Journal Universitas Sam Ratulangi.
- Rahmadillah, R., & Nurfaisa, N. (2024). Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2019–2022. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1). *Jurnal Ekonomi STIEP + Digilib UINSA*.
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018–2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2). *Kompetif*.
- Riandhani, L., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(4). *EJournals*.
- Rizkiyah, J., & Anitasari, H. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 6(1), 1–6. Bojonegoro. *Jurnal Universitas Bojonegoro*.
- Rosmadayanti, D., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(8), 1407–1423. Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*.
- Sari, R. A., & Rochmatullah, M. R. (2024). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017–2021). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5983–5994. *YRPI Journal*.
- Sarmila, S., Madjid, M. N., & Muthmainnah. (2024). Pengaruh PDRB, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17995–18006.
- Sembiring, R. W., Nurlinda, & Suryanto. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Utara. *Insight Management Journal*, 4(1), 34–43. Medan. journals.insightpub.org.
- Sofyan, V. R. W. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat. *Repositori Universitas Siliwangi. Tasikmalaya. Unsil Repository*.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer, Dana Desa dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(3), 345–360. Jakarta. *STIESIA E-Journal*.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Dampak Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 12(1), 1–4.
- Taufiq, I., Darmanto, D., & Utami, W. B. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2022. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(3), 404–411.
- Widia, V. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat. *Repositori Universitas Siliwangi. Tasikmalaya*.
1. Yovita Tamo Ina, & Adrianus Kabubu Hudang. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. Waingapu.